

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang berkembang pesat, Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan pondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta meningkatkan daya saing negara di kancah global. Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani disparitas wilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Akan tetapi, realisasi pembangunan infrastruktur berskala besar seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran negara, teknologi, serta sumber daya manusia (Djajawinata, D.T., Permana, A., & Yudhistira, M.H., 2023). Melihat isu ketimpangan tersebut, maka kerjasama internasional menjadi peranan penting, terutama melalui mekanisme bantuan pembangunan dan investasi asing.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjalin kerja sama pembangunan internasional yang telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Pada dekade 1950-an, Indonesia menerima bantuan teknis melalui program Point Four yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada 1949, sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya dalam mendukung pembangunan negara-negara berkembang. Selanjutnya, United Nations Development

Programme (UNDP) juga mulai aktif memberikan dukungan teknis dan kelembagaan kepada Indonesia sejak akhir 1940-an, khususnya dalam bidang administrasi publik dan pembangunan ekonomi (UNDP, 2001). Memasuki era Orde Baru, bentuk kerja sama pembangunan semakin beragam dengan kehadiran lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), yang mendanai berbagai proyek besar di bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan (ADB, 2020). Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara donor seperti Australia melalui AusAID yang sekarang berubah menjadi DFAT, Jerman melalui GIZ dan KfW, serta Korea Selatan melalui KOICA. Pasca-reformasi 1998, lanskap kerja sama pembangunan Indonesia kian terdiversifikasi dengan hadirnya lembaga-lembaga baru seperti Millennium Challenge Corporation (MCC) dari Amerika Serikat, Islamic Development Bank (IsDB), serta skema kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) dengan negara berkembang lainnya (MCC, 2024).

Dalam latar belakang perluasan kerja sama Indonesia dengan berbagai negara, studi ini akan secara khusus memfokuskan pada dua aktor utama: Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Belt and Road Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh Tiongkok. Fokus ini dipilih dengan mempertimbangkan empat alasan tertentu, yakni yang pertama, keduanya mewakili pendekatan pembangunan yang kontras namun sama-sama berpengaruh: JICA mengedepankan model Official Development Assistance (ODA) berbasis pinjaman lunak dengan akuntabilitas yang ketat seperti terlihat dalam proyek MRT Jakarta (JICA, 2024), sedangkan BRI menawarkan model

investasi terintegrasi dengan pendekatan yang lebih holistik dan fleksibel terhadap kebutuhan lokal.

Melanjutkan poin pertama, para aktor ini berasal dari dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia yang memiliki implikasi geopolitik langsung terhadap posisi strategis Indonesia di kawasan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi mitra kunci bagi Jepang yang ingin mempertahankan status quo pengaruh tradisionalnya, serta bagi Tiongkok yang sedang agresif memperluas hegemoni barunya (Lowy Institute, 2023). Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi sentral dalam tarik-menarik kepentingan, di mana investasi infrastruktur tidak lagi sekadar bantuan teknis, melainkan instrumen *soft power* untuk mengamankan jalur logistik strategis dan akses sumber daya alam di wilayah Indo-Pasifik (Zappa, 2024).

Ketiga, dalam satu dekade terakhir, volume investasi dan cakupan proyek dari JICA dan BRI telah mendominasi lanskap pembangunan nasional, jauh melampaui skema kerja sama pembangunan lainnya. Dominasi ini terlihat dari spesialisasi proyek yang masif, di mana JICA memegang peran vital dalam pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan dan energi berkelanjutan dengan standar akuntabilitas tinggi, seperti yang diterapkan dalam proyek MRT Jakarta (JICA, 2024). Di sisi lain, BRI secara agresif mengisi sektor konektivitas strategis dan hilirisasi industri dengan nilai kapital yang fantastis, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai \$5,9 miliar yang menjadi simbol percepatan pembangunan infrastruktur fisik (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, 2022).

Keempat, kehadiran JICA dan BRI menjadi simbol rivalitas geopolitik antara Jepang dan Tiongkok yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Persaingan ini menciptakan fenomena kompetisi institusional, di mana Indonesia merespons dengan strategi lindung nilai (*hedging*) untuk menyeimbangkan pengaruh kedua negara (Katada & Liao, 2020). Dinamika ini terlihat jelas ketika Indonesia menerima investasi Tiongkok untuk infrastruktur cepat guna mengejar pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertahankan Jepang sebagai mitra utama untuk proyek-proyek yang membutuhkan standar kualitas tinggi, mencerminkan adaptasi kebijakan nasional terhadap realitas kompetisi dua raksasa Asia tersebut (Agustina, 2025).

Indonesia memegang posisi strategis bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai medan kompetisi pengaruh antara dua kekuatan ekonomi Asia tersebut. Status Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara membuatnya menjadi mitra kunci dalam upaya ekspansi pengaruh geopolitik dan geoekonomi keduanya. Oleh karenanya, studi perbandingan efektivitas dua aktor ini tidak dapat dilepaskan dari konteks posisi tawar Indonesia dalam dinamika kawasan.

Tiongkok meluncurkan Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013 sebagai platform kerja sama ekonomi lintas kawasan yang ambisius. Inisiatif ini bertujuan membangun jaringan konektivitas global melalui jalur darat (Silk Road Economic Belt) dan laut (Maritime Silk Road) yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Di Indonesia, sejumlah proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung dengan investasi senilai \$5,9 miliar

yang menggunakan teknologi kereta berkecepatan tinggi, Pelabuhan Kuala Tanjung yang dirancang menjadi *hub* internasional di Selat Malaka, dan Kawasan Industri Morowali yang telah mengembangkan ekosistem industri nikel terintegrasi menjadi bagian dari implementasi BRI. BRI juga mencakup pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, dan jaringan telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia dengan mekanisme pendanaan yang didominasi pinjaman komersial dan investasi langsung dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Inisiatif ini dipandang sebagai strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara berkembang melalui pembangunan infrastruktur berskala besar yang bertujuan meningkatkan konektivitas perdagangan dan investasi (Jamestown Foundation, 2023).

Pada periode yang berdekatan, Jepang melalui JICA telah lama menjalin kerja sama pembangunan dengan Indonesia dengan pendekatan bantuan luar negeri berbasis ODA. Berdasarkan laporan dari Kanasugi Kenji, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Indonesia merupakan penerima ODA bilateral terbesar dari Jepang, dan Jepang sendiri merupakan mitra donor utama bagi Indonesia. JICA dikenal dengan rekam jejak proyek-proyek infrastruktur besar seperti MRT Jakarta yang menyediakan solusi transportasi massal modern dengan teknologi dan standar keselamatan Jepang, Pelabuhan Patimban yang dirancang sebagai alternatif Tanjung Priok untuk mengurangi kemacetan logistik, serta berbagai proyek transportasi seperti pembangunan jalan Trans-Sulawesi dan Trans-Sumatera, dan proyek energi terbarukan seperti PLTA Rajamandala di Jawa Barat. Pendekatan Jepang dalam pembangunan infrastruktur menekankan pada perencanaan matang, transfer teknologi,

keberlanjutan lingkungan, transparansi finansial, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam seluruh siklus proyek. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Paris Declaration on Aid Effectiveness, yang juga diterapkan dalam keberhasilan proyek MRT Jakarta yang kini menjadi percontohan infrastruktur transportasi publik modern di Indonesia (Prakoso, 2024).

Dualisme BRI dan JICA dalam pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks persaingan dua kekuatan ekonomi besar Asia. BRI menawarkan cakupan proyek yang luas dengan pendanaan besar dan implementasi cepat, sementara JICA menonjol melalui perancangan proyek yang memprioritaskan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (2022) menunjukkan bahwa proyek-proyek BRI telah memberikan dorongan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur keras di Indonesia, termasuk pelabuhan Kuala Tanjung, jalan tol Trans-Sumatera, dan proyek strategis Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Meskipun demikian, analisis dari BAPPENAS (2022) mengidentifikasi tantangan terkait keberlanjutan fiskal dan dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut. Di sisi lain, laporan JICA (2023) menunjukkan kontribusi signifikan dalam pembangunan fisik seperti MRT Jakarta dan Pelabuhan Patimban, serta pengembangan kapasitas institusional dan transfer teknologi. Perbedaan ini mencerminkan filosofi berbeda dimana BRI mengutamakan skala dan kecepatan, sementara JICA mengadopsi perspektif pembangunan yang lebih holistik.

Dalam persaingan strategis ini, efektivitas BRI dan JICA tidak hanya dapat diukur dari jumlah dana yang diinvestasikan, tetapi juga dari dampak

jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Laporan Lowy Institute (2023) menyatakan bahwa kehadiran BRI sangat terasa di wilayah-wilayah strategis melalui pembangunan jaringan rel, jalan tol, dan pelabuhan laut yang meningkatkan konektivitas fisik antar wilayah. Sebaliknya, analisis Wijaya (2019) menunjukkan bahwa JICA lebih menitikberatkan pada proyek infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan kapasitas institusional dan sumber daya manusia, yang dipandang memberikan dampak lebih berkelanjutan terhadap pembangunan nasional. Nababan dan Sinaga (2021) juga menegaskan bahwa proyek-proyek JICA sering melibatkan kerja sama erat dengan pemerintah lokal dan masyarakat setempat, sehingga menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam perencanaan dan implementasi proyek.

Dapat disimpulkan bahwa baik BRI maupun JICA memainkan peran yang signifikan dalam membentuk arah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kedua inisiatif ini tidak hanya merepresentasikan pendekatan yang berbeda dalam kerangka kerjasama pembangunan, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuatan geopolitik yang saling bersaing di kawasan Asia. Meskipun kedua aktor ini telah berkontribusi dalam berbagai sektor, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas masing-masing pendekatan dalam mendorong pembangunan nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji strategi Indonesia dalam menghadapi dan memanfaatkan pengaruh dualisme pembangunan antara BRI dan JICA, sekaligus mengevaluasi bagaimana strategi tersebut membentuk arah pembangunan infrastruktur nasional dan

memperkuat posisi tawar Indonesia dalam dinamika persaingan geopolitik kawasan jangka panjang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Setelah mengidentifikasi masalah dalam latar belakang, maka penelitian kali ini akan berpusat pada :

Bagaimana strategi indonesia dalam pengaruh dualisme pembangunan antara Belt Road Initiative (BRI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan strategi yang diterapkan Indonesia dalam mengelola pengaruh dualisme pembangunan antara Belt and Road Initiative (BRI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA), serta mengevaluasi implikasi dari strategi tersebut terhadap arah pembangunan infrastruktur nasional dan posisi strategis Indonesia di kawasan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, secara umum penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur akademik yang berkaitan dengan strategi negara berkembang dalam mengelola persaingan pengaruh kekuatan besar melalui instrumen kerjasama pembangunan. Dengan menganalisis strategi Indonesia dalam menghadapi dualisme pembangunan antara BRI dan

JICA, penelitian ini memperkaya wacana ilmiah tentang penerapan konsep hedging institusional dan politik luar negeri bebas aktif dalam konteks pembangunan infrastruktur lintas negara. Hasil studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana negara penerima bantuan tidak hanya merespons secara pasif, tetapi secara aktif membentuk dan memanfaatkan persaingan antara aktor donor untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya, serta memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan rasionalitas aktor dalam hubungan internasional dan kerjasama pembangunan internasional.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia dalam menentukan dan mengoptimalkan pilihan kemitraan strategis dengan inisiatif internasional yang ada, seperti BRI dan JICA, untuk pembangunan infrastruktur. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan praktis bagi lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, serta memanfaatkan potensi penuh dari setiap kerjasama internasional. Dengan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor penentu efektivitas dari dua inisiatif pembangunan besar ini, penelitian ini menawarkan acuan strategis untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari setiap proyek infrastruktur terkait, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Review Literatur**

Pembangunan infrastruktur menjadi medan kontestasi strategis antara negara-negara besar di Asia, terutama Tiongkok dan Jepang, dalam menjalin pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi menjadi target utama investasi dari kedua aktor melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) oleh Tiongkok dan Japan International Cooperation Agency (JICA) oleh Jepang. Berbagai studi telah mencoba mengkaji dinamika persaingan ini dari sudut pandang politik, ekonomi, maupun strategi kawasan. Bagian ini akan meninjau beberapa literatur yang relevan guna memahami bagaimana kedua inisiatif tersebut diposisikan dan dinilai dalam konteks pembangunan Indonesia.

Penelitian Trissia Wijaya (2019) dalam jurnalnya *The Political Economy of Chinese and Japanese Infrastructure Regime: A Case Study of Indonesia* membedah infrastruktur sebagai arena kontestasi geoekonomi antara Tiongkok dan Jepang. Dengan pendekatan ekonomi politik, studi ini menyoroti bagaimana masing-masing negara menyesuaikan pola agenda-setting dan political settlement dalam konteks transformasi negara di Indonesia. JICA dinilai berhasil melakukan institusionalisasi melalui narasi pembangunan yang terkoordinasi dengan struktur politik dan ekonomi nasional. Sebaliknya, pendekatan BRI lebih bersifat eksperimental dan cenderung terfragmentasi karena ekspansi kapital yang tidak merata dan lemahnya koordinasi antar pelaku sub-nasional. Meski

menawarkan perspektif segar melalui penekanan pada proses domestik dan relasi kuasa internal, jurnal ini masih terbatas dalam mengukur efektivitas langsung dari kedua rezim terhadap hasil pembangunan Indonesia secara terukur atau berdasarkan persepsi lokal.

Kemudian terdapat jurnal lainnya dari Muthia Ilma Fauziyyah, Taufik Hidayat, dan Anggun Dwi Panorama (2024) berjudul *Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2019–2023* yang menelusuri bagaimana BRI digunakan sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Studi ini menekankan pentingnya kerjasama ekonomi dalam kerangka liberalisme interdependensi, dengan fokus utama pada proyek-proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebagai simbol kerja sama bilateral yang erat. Indonesia dipotret sebagai aktor penting dalam keberlanjutan BRI di Asia Tenggara, dan Tiongkok sebagai investor utama melalui skema pendanaan fleksibel dan transfer teknologi. Walau jurnal ini berhasil menyampaikan signifikansi geopolitik serta manfaat ekonomi dari BRI, namun studi ini belum membahas secara mendalam dampak jangka panjang terhadap ketergantungan finansial Indonesia maupun evaluasi komparatif terhadap efektivitas proyek BRI dibandingkan proyek infrastruktur oleh mitra pembangunan lainnya seperti Jepang.

Jurnal ketiga dari Pascal Abb, Jeslyn Tan, dan Thu Hien Phan (2023) berjudul *The Belt and Road Initiative in Southeast Asia: A Delicate Balance Between External and Internal Security* yang membahas

ketegangan antara manfaat ekonomi dari BRI dan implikasi keamanan nasional di negara-negara Asia Tenggara. Studi ini menggarisbawahi bagaimana negara-negara penerima, seperti Malaysia dan Myanmar, menghadapi dilema antara menyambut investasi Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur dan kekhawatiran terhadap dominasi politik serta ketergantungan ekonomi. Jurnal ini menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional dan berargumen bahwa proyek-proyek BRI tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga memunculkan dinamika baru dalam kebijakan domestik dan hubungan luar negeri negara-negara ASEAN. Meski memberikan analisis yang mendalam terkait ancaman keamanan dan stabilitas politik, jurnal ini belum menggali cukup dalam perspektif masyarakat sipil lokal ataupun dampak jangka panjang terhadap tata kelola dan transparansi di sektor publik negara-negara penerima.

Penelitian keempat yang dikaji berangkat dari tulisan Saori N. Katada dan Jessica Liao (2020) berjudul *China and Japan in Pursuit of Infrastructure Investment Leadership in Asia: Competition or Convergence?* yang menganalisis dinamika persaingan dan difusi kebijakan antara Jepang dan Tiongkok dalam bidang pembiayaan infrastruktur di Asia. Jurnal ini menawarkan perspektif teoritis mengenai *policy diffusion* melalui mekanisme emulasi dan kompetisi, menjelaskan bagaimana kebijakan bantuan luar negeri Jepang turut membentuk strategi pembangunan Tiongkok, yang kemudian berkembang menjadi saingan utama melalui Belt and Road Initiative (BRI). Studi ini menyoroti

bagaimana kedua negara saling meniru dan bersaing dalam memperebutkan pengaruh regional melalui skema investasi pembangunan, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan global. Meskipun jurnal ini sangat kuat secara teoritis dan menyajikan analisis historis serta kelembagaan secara mendalam, penelitian ini tidak memberikan eksplorasi khusus terhadap bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespons dinamika tersebut secara lokal, termasuk dalam bentuk penyesuaian kebijakan atau preferensi strategis terhadap salah satu aktor.

Terakhir, *Aid and Fiscal Behaviour in Indonesia: The Case of a Lazy Government* milik Iman Sugema dan Anis Chowdhury (2005) yang menelusuri dampak bantuan luar negeri terhadap perilaku fiskal pemerintah Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa aliran bantuan luar negeri cenderung bersifat *demand-driven*, digunakan untuk menambal defisit anggaran ketimbang mendorong reformasi fiskal jangka panjang. Temuan utamanya menunjukkan bahwa bantuan proyek maupun program bersifat *fungible*, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran pembangunan justru mengalir ke pengeluaran rutin. Artikel ini menyoroti bagaimana bantuan luar negeri justru melemahkan insentif pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak dan memperkuat pendapatan domestik, sehingga menciptakan pola ketergantungan struktural. Walaupun menyediakan analisis ekonometrik yang kuat melalui pendekatan VAR dan *impulse response analysis*, studi ini masih kurang mengaitkan temuan empirisnya dengan konteks geopolitik atau kerangka strategis bantuan pembangunan seperti BRI maupun ODA Jepang sebagai perbandingan.

Kelima jurnal yang telah dikaji menunjukkan bahwa studi mengenai inisiatif BRI dan JICA di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih didominasi oleh pendekatan makro dan perspektif hubungan antarnegara. Meskipun memberikan pemahaman tentang motif strategis dan capaian politik-ekonomi masing-masing aktor, masih sedikit penelitian yang menelusuri secara konkret efektivitas pembangunan di tingkat lokal atau dampak nyata terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi lebih dalam implementasi proyek-proyek JICA dan BRI di Indonesia dari aspek efektivitas pembangunan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai sejauh mana proyek-proyek dari dua kekuatan ekonomi Asia ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

### **1.5.2. Kerangka Pemikiran**

Analisis strategi Indonesia dalam menghadapi pengaruh dualisme pembangunan antara Belt and Road Initiative (BRI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) memerlukan landasan teoritis yang mampu membaca fenomena ini dari dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi kalkulasi strategis aktor dan dimensi struktur hubungan kerjasama yang terbentuk. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua landasan teoritis dan konseptual yang saling melengkapi. Pertama, Rational Choice Theory yang dikembangkan oleh Robert Keohane sebagai kerangka analitis utama untuk membaca logika pengambilan

keputusan Indonesia sebagai aktor berdaulat. Kedua, konsep International Development Cooperation yang dikembangkan oleh Olav Stokke beserta dua konsep turunannya, yaitu bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri, sebagai kerangka untuk menganalisis struktur hubungan dan kondisionalitas yang melekat pada masing-masing skema kerjasama. Kedua landasan ini bekerja secara hierarkis dan saling menguatkan dalam menghasilkan analisis yang utuh terhadap permasalahan penelitian.

#### **1.5.2.1. Rational Choice Theory (RCT)**

Rational Choice Theory (RCT) yang dikembangkan oleh Robert Keohane dalam karyanya *After Hegemony* (1984) digunakan sebagai kerangka analitis utama dalam penelitian ini. Keohane mengembangkan teori ini dalam tradisi neoliberal institusionalisme dengan berangkat dari asumsi dasar bahwa negara merupakan aktor rasional yang beroperasi dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu sistem tanpa otoritas supranasional yang mengikat. Dalam kondisi anarki tersebut, negara tidak bertindak secara impulsif atau ideologis, melainkan secara kalkulatif berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan yang tersedia. Keohane menegaskan bahwa kerjasama internasional terjadi bukan karena negara-negara memiliki kesamaan nilai atau kepercayaan, melainkan karena setiap aktor memperhitungkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kerjasama lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung,

dan bahwa institusi internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama tersebut melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan transparansi antarpihak (Keohane, 1984).

Untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme rasionalitas aktor, penelitian ini juga merujuk pada elaborasi Jon Elster dalam *Explaining Social Behavior* (2007) yang mengidentifikasi tiga komponen utama rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Pertama, adanya himpunan tindakan yang dianggap layak atau feasible, yaitu sekumpulan opsi yang tersedia bagi aktor yang dibatasi oleh kendala logis, fisik, maupun ekonomi. Kedua, keyakinan rasional mengenai struktur kausal dari suatu situasi, yang memungkinkan aktor untuk memprediksi konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuat. Ketiga, preferensi subjektif yang digunakan untuk menyusun peringkat atas alternatif-alternatif tindakan berdasarkan hasil yang diharapkan atau nilai yang dianggap paling menguntungkan (Elster, 2007). Ketiga komponen ini relevan untuk memahami bagaimana Indonesia, dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal dan kebutuhan infrastruktur yang sangat besar, menyusun preferensi terhadap BRI dan JICA secara berbeda sesuai dengan karakteristik kebutuhan proyeknya.

Dalam konteks penelitian ini, Rational Choice Theory memungkinkan pembacaan terhadap tiga aspek strategis Indonesia secara sekaligus. Pertama, mengapa Indonesia secara bersamaan menerima BRI dan JICA alih-alih memilih satu mitra secara eksklusif.

Kedua, bagaimana Indonesia mendiferensiasi penggunaan keduanya secara sektoral, di mana pembiayaan BRI diarahkan pada proyek yang membutuhkan kecepatan dan skala masif seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Kawasan Industri Morowali, sementara JICA dipertahankan untuk proyek yang membutuhkan standar tata kelola tinggi dan transfer teknologi berkelanjutan seperti MRT Jakarta dan Pelabuhan Patimban. Ketiga, bagaimana Indonesia memanfaatkan persaingan antara Tiongkok dan Jepang sebagai instrumen untuk mempertahankan otonomi kebijakan nasionalnya. Katada dan Liao (2020) menyebut strategi semacam ini sebagai hedging institusional, yaitu pendekatan di mana negara berkembang memanfaatkan kompetisi antarlembaga donor untuk mempertahankan fleksibilitas kebijakan domestiknya dan menghindari ketergantungan struktural terhadap satu kekuatan tunggal. Dalam kerangka RCT, strategi hedging ini bukan sekadar respons defensif, melainkan ekspresi dari rasionalitas aktor yang secara aktif mengoptimalkan manfaat dari setiap kemitraan yang tersedia.

Secara keseluruhan pada teori ini, negara diposisikan bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai aktor strategis yang menimbang untung-rugi dari setiap tawaran kerja sama. Pandangan tersebut memungkinkan pembacaan ulang terhadap kerja sama internasional sebagai proses yang didorong oleh logika rasional, bukan sekadar diplomasi simbolik atau ketergantungan struktural. Fokus pada kepentingan, insentif, dan pilihan strategis memberikan pemahaman lebih

tajam terhadap efektivitas proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI dan JICA. Dengan melihat setiap proyek sebagai hasil dari pertimbangan rasional aktor-aktor yang terlibat, penelitian ini dapat mengungkap efektivitas kerja sama tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa indikator rasional seperti struktur pembiayaan, transparansi perjanjian, transfer teknologi, partisipasi pelaku lokal, serta keberlanjutan lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur BRI dan JICA yang telah atau sedang berjalan di Indonesia.

#### **1.5.2.2. Kerjasama Pembangunan Internasional**

Untuk melengkapi kerangka RCT yang berfokus pada logika kalkulasi aktor, penelitian ini menggunakan konsep International Development Cooperation yang dikembangkan oleh Olav Stokke dalam *Aid and Political Conditionality* (1995) sebagai kerangka analitis kedua. Stokke mendefinisikan kerjasama pembangunan internasional sebagai hubungan terstruktur antara negara donor dan negara penerima yang tidak semata-mata bersifat altruistik, melainkan dibentuk secara simultan oleh kepentingan politik, ekonomi, dan strategis dari pihak pemberi bantuan. Stokke menekankan bahwa setiap skema kerjasama pembangunan internasional selalu mengandung kondisionalitas, yaitu seperangkat persyaratan eksplisit maupun implisit yang harus dipenuhi oleh negara penerima sebagai prasyarat pencairan atau keberlangsungan bantuan. Kondisionalitas inilah yang menentukan karakter, kualitas, dan

dampak jangka panjang dari setiap bentuk kerjasama pembangunan, sehingga tidak dapat diabaikan dalam evaluasi efektivitasnya (Stokke, 1995). Konsep ini menjadi relevan secara langsung dalam penelitian ini karena BRI dan JICA memiliki struktur kondisionalitas yang sangat berbeda, dan perbedaan tersebut sebagian besar menjelaskan mengapa kedua skema menghasilkan dampak pembangunan yang berbeda di lapangan.

Dalam kerangka Stokke (1995), terdapat tiga indikator kondisionalitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas kerjasama pembangunan internasional, dan ketiganya memiliki relevansi langsung dengan temuan empiris penelitian ini. Indikator pertama adalah tata kelola dan transparansi atau good governance, yang mencakup persyaratan akuntabilitas, transparansi dokumen proyek, dan mekanisme pengaduan yang terstruktur. Perbedaan kondisionalitas pada indikator tata kelola inilah yang sebagian besar akan menjelaskan perbedaan tingkat resistensi sosial yang muncul pada kedua model proyek.

Indikator kondisionalitas kedua dari Stokke (1995) adalah perlindungan sosial dan hak komunitas terdampak, yang mensyaratkan bahwa proyek pembangunan tidak boleh dilaksanakan tanpa mekanisme yang memadai untuk melindungi hak dan mata pencaharian warga yang terkena dampak langsung. Perbedaan pada indikator ini digunakan untuk memperlihatkan bahwa kondisionalitas perlindungan sosial bukan

sekadar persyaratan normatif, melainkan variabel yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan operasional dan legitimasi sosial proyek.

Indikator kondisionalitas ketiga yang diidentifikasi Stokke (1995) adalah orientasi terhadap reformasi kebijakan ekonomi domestik negara penerima, yang dalam konteks aslinya merujuk pada persyaratan donor agar negara penerima melakukan penyesuaian kebijakan tertentu sebagai syarat bantuan. Dalam kerangka Stokke, langkah ini menandai pergeseran posisi aktor dari sekadar penerima kondisionalitas menjadi aktor yang mampu menetapkan kondisionalitasnya sendiri, sebuah dinamika yang mencerminkan kedewasaan institusional dan penguatan posisi tawar dalam relasi kerjasama pembangunan internasional.

Secara keseluruhan, Rational Choice Theory dan konsep International Development Cooperation Stokke bekerja secara komplementer dalam penelitian ini dengan fungsi analitis yang berbeda namun saling mengisi. Rational Choice Theory menjelaskan dimensi internal pengambilan keputusan Indonesia, yaitu bagaimana Indonesia sebagai aktor rasional mengevaluasi pilihan kerjasama berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat untuk memaksimalkan utilitas nasional dalam jangka panjang. Konsep International Development Cooperation Stokke beserta dua konsep turunannya, bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri, menjelaskan dimensi eksternal yang membentuk ruang gerak Indonesia, yaitu bagaimana struktur kondisionalitas yang berbeda antara ODA berbasis JICA dan pinjaman semi-komersial

berbasis BRI secara struktural menghasilkan perbedaan tata kelola, perlindungan sosial, dan orientasi kebijakan yang pada akhirnya menentukan efektivitas pembangunan di lapangan. Dengan menggunakan kedua kerangka ini secara bersamaan, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan perbedaan antara BRI dan JICA, tetapi juga menjelaskan secara kausal mengapa perbedaan tersebut terjadi dan bagaimana Indonesia meresponsnya secara strategis.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

Bagian ini berisi uraian mengenai karakteristik dan definisi dari konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini, dilengkapi kemungkinan-kemungkinan operasionalisasinya. Terdapat tiga konsep utama yang merupakan turunan dari teori yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya, yakni Rasionalitas Aktor, Efektivitas Bantuan, dan Kerjasama Internasional. Pengertian mendalam perihal konsep-konsep utama di kajian ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih pada teori yang digunakan untuk menganalisis perbandingan bantuan infrastruktur di Indonesia.

#### **1.6.1.1. Rasionalitas Aktor**

*Rational Choice Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Jon Elster pada penelitiannya terhadap teori Keohane, mendefinisikan rasionalitas aktor sebagai kapasitas suatu entitas, seperti negara, untuk mengambil keputusan secara sadar berdasarkan perhitungan untung dan rugi atas

berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Rasionalitas tersebut dibangun di atas tiga komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya himpunan tindakan yang dianggap layak atau feasible, yaitu sekumpulan opsi yang tersedia bagi aktor yang dibatasi oleh kendala logis, fisik, maupun ekonomi. Kedua, keyakinan rasional mengenai struktur kausal dari suatu situasi, yang memungkinkan aktor untuk memprediksi konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuat. Ketiga, preferensi subjektif yang digunakan untuk menyusun peringkat atas alternatif-alternatif tindakan berdasarkan hasil yang diharapkan atau nilai yang dianggap paling menguntungkan (Elster, 2007).

Melalui kerangka ini, negara dipandang sebagai entitas yang bertindak secara kalkulatif dan instrumental, yaitu memilih tindakan yang paling mungkin memberikan manfaat optimal sesuai dengan prioritas nasional serta pertimbangan strategis jangka panjang. Sedangkan dari perspektif Robert O. Keohane sendiri, seperti yang dijelaskan pada bagian kerangka, Ia menekankan bahwa meskipun negara-negara merupakan aktor rasional sebagaimana diasumsikan oleh teori realis struktural, namun tindakan mereka dapat diprediksi dan diarahkan melalui pembentukan pengaturan institusional yang mengandung aturan dan prinsip-prinsip yang mendorong kerjasama. Keohane (1989) berargumen bahwa institusi internasional penting bagi tindakan negara karena mempengaruhi insentif yang dihadapi negara, meskipun kepentingan dasar negara tersebut sudah didefinisikan secara otonom.

### **1.6.1.2. Bantuan Luar Negeri**

Dalam penelitian ini, konsep bantuan luar negeri merujuk pada pemikiran Olav Stokke mengenai hubungan terstruktur antara negara donor dan negara penerima. Bantuan luar negeri dipahami bukan sekadar tindakan yang bersifat altruistik, melainkan sebuah instrumen yang dibentuk secara simultan oleh kepentingan politik, ekonomi, serta strategis dari pihak pemberi bantuan. Esensi utama dari skema bantuan ini adalah melekatnya prinsip kondisionalitas, yaitu seperangkat persyaratan eksplisit maupun implisit yang wajib dipenuhi oleh negara penerima sebagai prasyarat pencairan atau keberlangsungan bantuan. Kondisionalitas inilah yang pada akhirnya akan menentukan karakter, kualitas, serta dampak jangka panjang dari setiap bentuk kerjasama pembangunan yang diberikan (Stokke, 1995).

konsep bantuan luar negeri atau Official Development Assistance (ODA) yang dikodifikasikan secara baku oleh OECD Development didefinisikan sebagai aliran dana dari pemerintah negara maju kepada negara berkembang yang memenuhi tiga syarat: berasal dari sumber resmi pemerintah, bertujuan utama untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, serta mengandung unsur hibah atau grant element minimal 25 persen dari total nilai pinjaman (OECD, 2023). Lancaster (2007) dalam *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa bantuan luar negeri selalu mengandung motif ganda, yaitu kepentingan donor dan

kepentingan penerima yang tidak selalu selaras sepenuhnya, sehingga evaluasi efektivitasnya harus mempertimbangkan kedua sisi tersebut.

### **1.6.1.3. Pinjaman Luar Negeri**

Konsep pinjaman luar negeri dalam penelitian ini berakar pada pemikiran Dragoljub Avramovic mengenai *external sovereign lending*. Avramovic secara sistematis membedakan pinjaman ke dalam dua jenis utama berdasarkan struktur bunganya, yaitu pinjaman lunak atau *concessional loan* dan pinjaman komersial atau *non concessional loan*. Pinjaman lunak dicirikan oleh penerapan suku bunga yang berada di bawah harga pasar serta memiliki durasi pelunasan yang panjang. Sebaliknya, pinjaman komersial beroperasi mengikuti mekanisme harga pasar dengan kondisionalitas finansial yang jauh lebih ketat (Avramovic, 1964). Perbedaan struktur kondisionalitas finansial ini sejalan dengan pandangan Olav Stokke, dimana variasi prasyarat tersebut bukanlah sekadar persoalan teknis administratif belaka. Perbedaan tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan nyata dari perbedaan orientasi strategis antar negara donor dalam memanfaatkan instrumen kerja sama pembangunan demi mencapai kepentingan nasional mereka masing masing (Stokke, 1995).

## **1.6.2. Definisi Operasional**

### **1.6.2.1. Rasionalitas Aktor**

Rasionalitas pada penelitian ini merujuk pada pertimbangan strategis dan keputusan yang diambil oleh negara, yakni Indonesia, dalam menerima dan mengarahkan proyek-proyek infrastruktur yang

ditawarkan oleh dua aktor pemberi bantuan, yaitu Jepang melalui JICA dan Tiongkok melalui BRI. Fokus utama terletak pada bagaimana Indonesia menilai manfaat jangka panjang dari proyek-proyek tersebut berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional, keberlanjutan sosial, penguatan kapasitas lokal, serta nilai strategis infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Wijaya, 2019).

Rasionalitas ini mencakup pemilihan sektor, lokasi, dan skala proyek, serta respons terhadap dinamika geopolitik di kawasan Asia, seperti persaingan pengaruh antara Jepang dan Tiongkok dalam infrastruktur regional Asia Tenggara (Hillman, 2018). Selain dari sisi penerima bantuan, rasionalitas aktor juga ditilik dari pihak pemberi bantuan, yakni Jepang dan Tiongkok. Namun, dalam konteks penelitian ini, pertimbangan strategis dari aktor pemberi bantuan hanya diuraikan sebagai latar belakang motif eksternal yang mempengaruhi penawaran proyek dan bentuk kerja sama yang disodorkan kepada Indonesia.

#### **1.6.2.2. Bantuan Luar Negeri**

Definisi operasional dari bantuan luar negeri pada penelitian ini secara khusus merujuk pada instrumen pembiayaan pembangunan resmi yang disalurkan oleh aktor negara donor kepada Indonesia (Stokke, 1995). Dalam konteks operasional penelitian ini, instrumen bantuan luar negeri direpresentasikan secara eksklusif oleh keterlibatan pihak Jepang melalui Japan International Cooperation Agency. Skema dari lembaga Jepang ini secara penuh beroperasi dalam koridor Official Development Assistance, dengan suku bunga yang sangat rendah bahkan menyentuh

0,1 persen dan tenor pelunasan panjang hingga 40 tahun beserta masa tenggang yang memadai, sehingga memiliki kondisionalitas tata kelola yang ketat sesuai standar kelembagaan global (JICA, 2023). Selain bertumpu pada aspek finansial, instrumen pembiayaan ini juga diukur melalui indikator teknis berupa prasyarat ketat terhadap standar pelestarian lingkungan, pelibatan masyarakat lokal, serta kepastian mekanisme transfer kapasitas bagi tenaga ahli domestik pada tiap tahapan konstruksi proyek (Stokke, 1995).

Penerimaan atas kondisionalitas ketat dari skema bantuan luar negeri Jepang ini tidak dioperasionalkan sebagai bentuk kepatuhan buta, melainkan sebagai manifestasi nyata dari besarnya agensi negara penerima dalam menentukan arah pembangunan domestik (Jones dan Hameiri, 2022). Indikator penerimaan ini merupakan bagian dari manuver rasional Indonesia dalam menjalankan strategi lindung nilai institusional untuk menyeimbangkan dominasi ekonomi asing di kawasan. Dengan secara sadar memilih skema pembiayaan yang memprioritaskan kualitas struktural serta stabilitas fiskal, Indonesia memposisikan bantuan luar negeri sebagai penyeimbang bagi instrumen modal dari aktor donor lain yang lebih agresif secara komersial (Keohane, 1984).

### **1.6.2.3. Pinjaman Luar Negeri**

Definisi operasional dari pinjaman luar negeri pada penelitian ini secara spesifik merujuk pada instrumen pembiayaan infrastruktur yang disalurkan oleh pihak Tiongkok melalui kerangka Belt and Road

Initiative (Malik et al., 2021). Skema pinjaman luar negeri ini dioperasionalkan sebagai bentuk pinjaman semi komersial atau non concessional loan yang beroperasi mengikuti dinamika pasar (Avramovic, 1964). Indikator operasional dari skema ini diukur melalui penetapan suku bunga yang cukup tinggi, yakni berkisar antara tiga koma empat hingga empat koma dua persen, yang mana angka tersebut berada jauh di atas standar pembiayaan lunak konvensional. Penerapan struktur bunga semi komersial beserta tenor yang lebih singkat ini pada praktiknya menghasilkan indikator operasional berupa peningkatan tekanan fiskal yang lebih berat bagi ruang anggaran negara penerima jika dikomparasikan dengan skema pembiayaan alternatif lainnya (Malik et al., 2021).

Operasionalisasi pinjaman luar negeri ini tidak berhenti pada sekadar perhitungan angka finansial, melainkan turut diukur melalui indikator orientasi strategis dari negara donor maupun negara penerima. Dari sisi negara donor, pemberlakuan kondisionalitas finansial yang ketat pada proyek Belt and Road Initiative dioperasionalkan sebagai cerminan instrumen kerja sama pembangunan yang digerakkan untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi politik Tiongkok (Stokke, 1995). Penerimaan pinjaman ini merupakan langkah kalkulatif Indonesia demi mengamankan utilitas berupa percepatan konektivitas fisik secara instan yang secara rasional dianggap sepadan dengan beban biaya yang harus ditanggung (Keohane, 1984).

## 1.7. Argumen Penelitian

Ketika menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas fiskal domestik semata, Indonesia menjalin kerjasama dengan dua mitra strategis yang menawarkan model bantuan pembangunan yang secara mendasar berbeda. Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) menawarkan skema pembiayaan semi-komersial berskala besar dengan orientasi pada percepatan konstruksi fisik dan konektivitas kawasan, sementara Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) mengusung mekanisme Official Development Assistance yang menekankan standar tata kelola ketat, transfer teknologi berkelanjutan, dan pembangunan kapasitas kelembagaan jangka panjang. Kehadiran dua model kerjasama yang kontras ini menciptakan kondisi dualisme pembangunan yang menempatkan Indonesia pada posisi yang harus dikelola secara strategis, di mana tolok ukur keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besaran investasi yang masuk, tetapi juga oleh sejauh mana setiap skema kerjasama berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial, penguatan kapasitas lokal, dan stabilitas fiskal negara penerima.

Penelitian ini dilandasi oleh argumen bahwa Indonesia tidak bersikap pasif dalam menghadapi dualisme tersebut, melainkan secara aktif merancang strategi untuk memaksimalkan manfaat dari kedua kemitraan sekaligus meminimalkan risiko yang menyertainya. Strategi tersebut terwujud dalam diferensiasi penggunaan kedua mitra secara sektoral, di mana Indonesia mengarahkan pembiayaan BRI pada proyek yang

membutuhkan kecepatan dan skala masif, sementara mempertahankan JICA untuk proyek yang membutuhkan kualitas tata kelola dan transfer pengetahuan yang mendalam. Perbedaan kondisionalitas antara kedua skema kerjasama inilah yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan efektivitas yang dapat diukur secara konkret. Melalui analisis terhadap strategi Indonesia dalam mengelola pengaruh dualisme pembangunan antara BRI dan JICA, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana posisi aktif Indonesia sebagai aktor rasional berdaulat membentuk arah dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional dalam jangka panjang.

### **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui data empiris dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (Masyhuri, 2011, p. 20). Teknik yang umum digunakan dalam pendekatan ini meliputi wawancara, kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan teknik analisis konten dan studi kasus. Analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi makna dari teks, gambar, atau bentuk komunikasi lainnya (Bryman & Burgess, 2009). Dalam konteks penelitian ini, analisis konten akan diterapkan untuk meneliti dokumen resmi terkait kerjasama BRI juga JICA dengan Indonesia, termasuk situs web, media sosial, dan artikel berita. Dalam penelitian ini, studi kasus—yakni metode yang digunakan untuk melakukan kajian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu (Yin, 2018) akan digunakan untuk

menganalisis efektivitas antara bantuan pembangunan yang diberikan oleh BRI dan JICA di Indonesia.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang akurat mengenai keadaan atau fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai metode), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian ini bersifat non-lapangan (*desk study*) di Semarang, karena seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap dokumen resmi, laporan kebijakan, publikasi institusional, artikel berita, serta literatur ilmiah yang relevan. Sumber-sumber tersebut berasal dari ruang digital seperti situs web pemerintah Indonesia, lembaga donor internasional (JICA dan mitra BRI), serta media daring yang memuat informasi mengenai implementasi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian difokuskan pada penelaahan mendalam terhadap narasi, data, dan kebijakan yang dapat diakses tanpa kehadiran fisik di lokasi proyek.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian tidak terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas non-personal berupa kebijakan Indonesia terkait kerja sama pembangunan, dokumen resmi yang merepresentasikan bentuk dan mekanisme kerja sama antara Indonesia dengan BRI maupun JICA, serta hasil konkret dari implementasi proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan. Subjek-subjek ini akan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas masing-masing kerja sama dalam mendukung pembangunan nasional, baik dari sisi keberlanjutan proyek, manfaat ekonomi, maupun kontribusi terhadap kepentingan strategis Indonesia.

### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berbentuk narasi, deskriptif, dan teks. Data ini meliputi dokumen, kebijakan pemerintah, transkrip wawancara, artikel berita, serta unggahan media sosial yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

### **1.8.5. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui metode telaah pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang beragam, termasuk buku teks dalam bentuk fisik maupun elektronik, jurnal ilmiah, artikel berita dari media mainstream, serta

laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi terkait dengan topik yang diangkat.

#### **1.8.6. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen resmi, laporan institusional, publikasi pemerintah, serta artikel berita yang relevan terkait proyek-proyek infrastruktur BRI dan JICA di Indonesia. Selain itu, teknik analisis isi juga digunakan untuk menafsirkan makna dan kecenderungan dalam komunikasi kebijakan kedua aktor melalui media daring, situs web resmi, dan publikasi lembaga donor. Penelitian ini turut menerapkan pendekatan studi kasus untuk menggali lebih dalam implementasi proyek-proyek tertentu seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan MRT Jakarta, guna mendapatkan pemahaman kontekstual mengenai strategi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi masing-masing model kerjasama. Wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah, akademisi, atau perwakilan lembaga donor akan dilakukan untuk memperkaya perspektif empiris dan memastikan validitas temuan.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data sebagaimana dijelaskan oleh Strauss dan Corbin (1990), yang mencakup lima tahapan utama. Pertama, peneliti membaca dan menelaah seluruh data secara cermat, termasuk dokumen kebijakan, laporan kerja sama, dan publikasi yang relevan, untuk memahami konteks kerja sama

pembangunan antara BRI dan JICA. Kedua, peneliti mengidentifikasi tema-tema dan kategori yang muncul dari data, seperti mekanisme pendanaan, keberlanjutan proyek, transfer teknologi, dan pelibatan aktor lokal. Ketiga, peneliti membuat kode untuk setiap tema dan kategori tersebut. Keempat, data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan atau keterkaitan antar tema. Kelima, peneliti melakukan proses reduksi dengan menyederhanakan, memfokuskan, dan menyaring data agar hanya informasi yang relevan dan bermakna yang dianalisis lebih lanjut.

Hasil akhir dari proses analisis ini disajikan dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur dan dikaitkan dengan kerangka *Rational Choice Theory* dan Kerjasama Pembangunan Internasional untuk menilai preferensi rasional Indonesia dalam memilih mitra kerja sama. Penilaian ini bertujuan untuk menelaah strategi Indonesia dalam menyikapi dualisme antara BRI dan JICA dalam pembangunan infrastruktur nasional secara berkelanjutan dan sesuai dengan kepentingan strategis Indonesia.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan berbagai jenis data dari sumber yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih valid. Validitas data diperkuat melalui kajian mendalam terhadap dokumen resmi dan pemilihan sumber data yang kredibel. Peneliti juga menerapkan refleksi diri untuk menyadari posisi dan kemungkinan bias dalam proses interpretasi data. Keandalan penelitian dijaga melalui

dokumentasi proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, sehingga memungkinkan verifikasi oleh peneliti lain.